KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-29

CIPASUNG – TASIKMALAYA
1 Rojab 1415 H
4 Desember 1994 M

SUMBER
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 2011. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, 1926—2010 M).* Surabaya-Jakarta: Penerbit Khalista bekerja sama dengan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU.
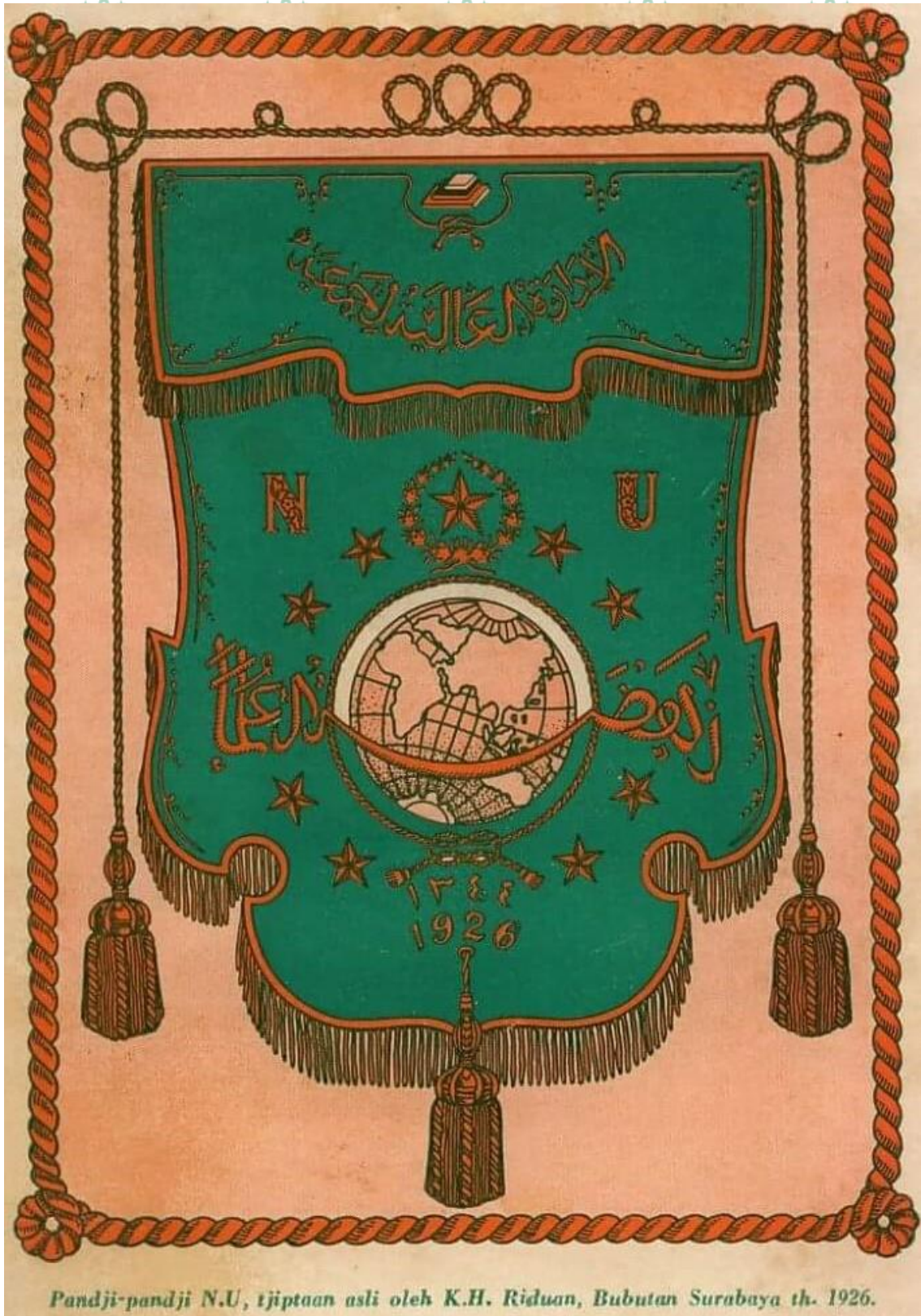
Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-29 Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 02/MNU-29/1994

Tentang

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI AHKAM/ MASAIL DINIYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MUKTAMAR KE-29 NAHDLATUL ULAMA

Memperhatikan:

a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
b. Penjelasan tentang Materi Ahkam/Bahtsul Masail yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
c. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seringkali mendesakkan perubahan dan pergeseran yang menyangkut tatanilai dan pandangan yang dianut. Untuk itu, dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, Nahdlatul Ulama dituntut untuk senantiasa dapat memberikan respon yang positif dan kreatif.
d. Bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama sebagai lembaga aspirasi dan Jam'iyyah menyadari sepenuhnya perlunya memperhatikan segala perkembangan masyarakat, baik mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi serta pembinaan dan kesejahteraan umat
e. Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung dalam Muktamar NU ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat
f. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam Sidang Pleno Komisi Ahkam/Masail Diniyah Sabtu tanggal 29 Rabiul Akhir 1415 H/3 Desember 1994.

Mengingat :

a. *Ittifaq* peserta Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama dalam sidang pleno tanggal 1 Rajab 1415 H/4 Desember 1994, atas laporan Komisi Ahkam/Masail Diniyyah,
b. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Desember 1993 Nomor 2055/BI.01/XII/1993 tentang Penetapan Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama	:	Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Ahkam/ Masail Diniyah seperti yang tertera dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4;
Kedua	:	Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1994-1999 untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas.

Ditetapkan di: Cipasung, Tasikmalaya

Tasikmalaya: 2 Rajab 1415 H
5 Desember 1994 M

PIMPINAN SIDANG PLENO XXVIII

ttd	ttd	ttd
KH Ma'ruf Amin	DR. H. S Agil Almunawwar, MA	Prof. H. Chatibul Umam
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-29

Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M.

TEAM PERUMUS KOMISI AHKAM:

1. Prof. KH. Chatibul Umam ... Ketua
2. Dr. KH. Aqiel Al-Munawar, MA. ... Wakil Ketua
3. KH. Aziz Masyhuri ... Sekretaris
4. KH. Ghozali ... Wakil Sekretaris
5. KH. Shidqi Mudzhar ... Anggota
6. KH. Adzro'ie ... Anggota
7. KH. Abdullah Mukhtar ... Anggota
8. KH. Asyhari ... Anggota
9. KH. Adnan Iskandar ... Anggota
10. KH. Mas'udy ... Anggota
11. KH. Tgk. Nuruzzahri ... Anggota
12. KH. Utsman Hasyim ... Anggota
13. KH. Farihin ... Anggota
14. K.M. Ardani ... Anggota
15. K. Yasin Asmuni ... Anggota
16. KH.M. Najib Mohammad ... Anggota
17. K. Romadlon Chotib ... Anggota

PIMPINAN SIDANG KOMISI I (MASAIL DINIYAH)

Prof. KH. Chatibul Umam ... Ketua

KH. Aziz Masyhuri ... Sekretaris

398. Transplantasi Organ Babi untuk Manusia

S. Sebuah penelitian ilmiah berhasil dipertahankan dalam forum ujian disertasi doktor di Universitas Airlangga. Hasil penelitian itu adalah bahwa tulang rawan babi efektif untuk mengganti gigi manusia. Sementara hasil pengujian tim klinis RS. Dr. Sardjito Yogyakarta membuktikan bahwa katup jantung babi paling sesuai sebagai pengganti katup jantung manusia. Bagaimana hukum transplantasi organ babi (khinzir) untuk menggantikan organ sejenis/lainnya pada manusia?

J. 1. Transplantasi gigi dengan organ babi dan sejenisnya, hukumnya tidak boleh. Sebab masih banyak benda lain yang bisa digunakan sebagai pengganti dan karena belum sampai pada tingkat kebutuhan yang mendesak.

2. Transplantasi dengan organ babi untuk menggantikan organ sejenisnya pada manusia, hukumnya tidak boleh, kecuali jika sangat diperlukan dan tidak ada organ lain yang seefektif organ babi tersebut. Maka hukumnya boleh menurut pendapat Imam Ramli, Imam Isnawi dan Imam Subki. Adapun menurut Imam Ibn Hajar, orang yang menerima transplantasi tersebut harus *ma'shum*.

Pengertian TRANSPLANTASI

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *to transplant*, yang berarti *to move from one place to another*, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Adapun pengertian menurut ahli ilmu kedokteran, transplantasi itu ialah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain. Yang dimaksud jaringan di sini ialah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu.

Yang dimaksud organ ialah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan lain-lain.

Pembagian TRANSPLANTASI

Melihat dari pengertian di atas, kita bisa membagi transplantasi itu pada dua bagian:

1. Transplantasi jaringan seperti pencangkokan cornea mata.
2. Transplantasi organ seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan sebagainya.

Melihat dari hubungan genetik antara donor (pemberi jaringan atau organ yang ditransplantasikan) dan *resipien* (orang yang menerima pindahan jaringan atau organ), ada 3 macam pencangkokan:

1. *Auto transplantasi*, yaitu transplantasi di mana donor resipiennya satu individu. Seperti seorang yang pipinya dioperasi, untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri.
2. *Homo transpalantasi*, yakni di mana transplantasi itu donor dan resipiennya individu yang sama jenisnya, (jenis di sini bukan jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia).

   Pada homo trasplantasi ini bisa terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup; bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut *cadaver* donor, sedang resipien masih hidup.
3. *Hetero transplantasi* ialah yang donor dan resipiennya dua individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan sedangkan resipiennya manusia.

Pada *auto transplantasi* hampir selalu tidak pernah mendatangkan reaksi penolakan, sehingga jaringan atau organ yang ditransplantasikan hampir selalu dapat dipertahankan oleh resipien dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada *homo transpalantasi* dikenal 3 kemungkinan:

1. Apabila resipien dan donor adalah saudara kembar yang berasal dari satu telur, maka transplantasi hampir selalu tidak menyebabkan reaksi penolakan. Pada golongan ini hasil transpalantasinya serupa dengan hasil transpalantasi pada *auto transplantasi.*
2. Apabila resipien dan donor adalah saudara kandung atau salah satunya adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini lebih besar dari pada golongan pertama, tetapi masih lebih kecil dari pada golongan ketiga.
3. Apabila resipien dan donor adalah dua orang yang tidak ada hubungan saudara, maka kemungkinan besar transplantasi selalu menyebabkan reaksi penolakan.

Pada waktu sekarang *homo transpalantasi* paling sering dikerjakan dalam klinik, terlebih-lebih dengan menggunakan *cadaver* donor, karena:

1. Kebutuhan organ dengan mudah dapat dicukupi, karena donor tidak sulit dicari.
2. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang *immunologi*, maka reaksi penolakan dapat ditekan seminimal mungkin.

Pada *hetero transplantasi* hampir selalu menyebabkan timbulnya reaksi penolakan yang sangat hebat dan sukar sekali diatasi. Maka itu

penggunaannya masih terbatas pada binatang percobaan. Tetapi pernah diberitakan adanya percobaan mentransplantasikan kulit babi yang sudah di*iyophilisasi* untuk menutup luka bakar yang sangat luas pada manusia.

Sekarang hampir semua organ telah dapat ditransplantasikan, sekalipun sebagian masih dalam taraf menggunakan binatang percobaan, kecuali otak, karena memang tehnisnya amat sulit. Namun demikian pernah diberitakan bahwa di Rusia sudah pernah dilakukan percobaan mentransplantasikan "kepala" pada binatang dengan hasil baik.

Keterangan,dari kitab:

1. *Fath al-Wahhab* dan *Futuhat al-Wahhab*[1]

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لِحَاجَةٍ) إِلَى وَصْلِهِ (بِنَجِسٍ) مِنْ عَظْمٍ (لَا يَصْلُحُ) لِلْوَصْلِ (غَيْرُهُ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ (عُذِرَ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ

(قَوْلُهُ لِحَاجَةٍ إِلَى وَصْلِهِ) كَخَلَلٍ فِي الْعُضْوِ أَوْ نَحْوِهِ اهـ بَرْمَاوِيٌّ. وَخِيَاطِهِ الْجُرْحَ بِخِيَاطَةٍ نَجِسٍ ... (قَوْلُهُ مِنْ عَظْمٍ) أَيْ وَلَوْ مُغَلَّظًا اهـ بَرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لاَ يَصْلُحُ لِلْوَصْلِ غَيْرُهُ) أَيْ أَصْلاً وَقْتَ إِرَادَتِهِ حَتَّى لَوْ صَلُحَ غَيْرُهُ وَكَانَ هَذَا أَصْلَحَ أَوْ أَسْرَعَ إِلَى الْجَبْرِ لَمْ يَجُزْ الْوَصْلُ بِهِ خِلاَفًا لِلسُّبْكِيِّ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إِنَّ لَحْمَ الْأَدَمِيِّ لاَ يَنْجَبِرُ سَرِيْعًا إِلاَّ بِعَظْمِ نَحْوِ الْكَلْبِ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ عُذْرٌ وَتَبِعَهُ الْعَلاَّمَةُ الْخَطِيْبُ وَأَقَرَّهُ الْعَلاَّمَةُ ز ي وَلَوْ تَعَارَضَ نَجَسٌ غَيْرُ مُغَلَّظٍ وَنَجَسٌ مُغَلَّظٌ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيْمُ غَيْرِ الْمُغَلَّظِ مَعَ كَوْنِهِ بَطِيءَ الْبُرْءِ وَكَوْنِ الْمُغَلَّظِ سَرِيْعَهُ

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) dengan *qayyid* yang saya tambahkan, (sebab butuh) menyambungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (yang tidak layak) dijadikan penyambung (tulang selainnya), dan redaksi tersebut lebih tepat dari redaksi al-Nawawi: "Karena tidak adanya tulang suci.", (maka ia dianggap *udzur*) dalam hal tersebut, oleh sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut –di tubuhnya-.

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Sebab butuh menyambungnya."), seperti terdapat aib pada anggota tubuh atau semisalnya. Begitu menurut Syaikh Barmawi. Dan menjahit luka dengan benang najis …

(Ungkapan beliau: "Maksudnya tulang najis."), maksudnya meski najis *mughalazhah*. Begitu menurut Syaikh Barmawi.

---

[1] Sulaiman bin Manshur al-Jamal, *Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 416-417.

(Ungkapan beliau: "Yang tidak layak dijadikan penyambung tulang selainnya."), maksudnya sama sekali tidak layak di waktu hendak menyambungnya. Sehingga bila ada tulang lain yang layak, dan tulang najis ini lebih layak, atau lebih cepat lekatnya, maka tidak boleh menyambung dengan tulang najis tersebut. Berbeda dengan al-Subki yang menyatakan: "Dan bila seorang pakar berkata: "Sungguh daging manusia itu tidak bisa tertambal kecuali dengan tulang semacam anjing.", maka kondisi tersebut dinilai kuat sebagai *udzur* (boleh menambal dengannya)." *Al-'Allamah* al-Khatib mengikuti pendapat itu dan *al-'Allamah* al-Zayyadi menetapkannya. Bila najis selain *mughalazah* bertentangan dengan najis *mughalazah*, maka cukup jelas diprioritaskan najis selain *mughalazah* meski sembuhnya agak lambat, dan najis *mughalazah* sembuhnya cepat.

2. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*[2]

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) لِانْكِسَارِهِ مَثَلاً وَاحْتِيَاجِهِ إِلَى الْوَصْلِ (بِنَجِسٍ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ أَوْ وَجَدَهُ وَقَالَ أَهْلُ الْخُبْرَةِ أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُ وَوَصَلَهُ بِالنَّجِسِ (فَمَعْذُوْرٌ) فِيْ ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلاَتُهُ مَعَهُ لِلضَّرُوْرَةِ ... وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ لَحْمَ الْأَدَمِيِّ لاَ يَنْجَبِرُ سَرِيْعًا إِلاَّ بِعَظْمِ نَحْوِ كَلْبٍ فَيُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الْأَسْنَوِيُّ أَنَّهُ عُذْرٌ ... (وَإِلاَّ) أَيْ وَإِنْ وَصَلَ بِهِ مَعَ وُجُوْدِ الطَّاهِرِ الصَّالِحِ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْوَصْلِ حَرُمَ عَلَيْهِ لِتَعَدِّ بِهِ وَ (وَجَبَ) عَلَيْهِ (نَزْعُهُ) وَأُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ (إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ظَاهِرًا)

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah misalnya, dan butuh disambung, (dengan najis karena tidak ada tulang suci) yang layak) dijadikan penyambung, atau ada namun seorang pakar berkata: "Sungguh tulang suci tersebut tidak berguna.", dan ia menyambungnya dengan tulang najis, (maka ia dianggap *udzur*) dalam hal tersebut, oleh sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut -di tubuhnya-, karena kondisi darurat. ... Dan bila seorang pakar berkata: "Sungguh daging manusia itu tidak bisa tertambal kecuali dengan tulang semacam anjing.", maka kondisi itu dinilai kuat sebagai *udzur* -boleh menambal dengannya- seperti hemat al-Isnawi, ... (dan bila tidak begitu), maksudnya bila ia menyambungnya dengan tulang najis dalam kondisi terdapat tulang suci, atau tidak butuh menyabungnya, maka penyambungan itu haram karena keteledorannya, dan (wajib) baginya (mencopot tulang najis itu), dan ia dipaksa mencopotnya (bila tidak khawatir bahaya yang nyata).

---

[2] Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 190-191.

3. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*[3]

(وَلَوْ وُصِلَ عَظْمُهُ) أَيْ عِنْدَ احْتِيَاجِهِ لَهُ بِكَسْرٍ وَنَحْوِهِ (بِنَجِسٍ) مِنَ الْعَظْمِ وَلَوْ مُغَلَّظًا، وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى دَهْنُهُ بِمُغَلَّظٍ أَوْ رَبْطُهُ بِهِ (لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الصَّالِحِ لِذَلِكَ (فَمَعْذُوْرٌ) فِيْهِ فَتَصِحُّ صَلاَتُهُ مَعَهُ لِلضَّرُوْرَةِ وَلاَ يَلْزَمُهُ كَمَا فِيْ الرَّوْضَةِ نَزْعُهُ إِذَا وُجِدَ الطَّاهِرُ، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ نَزْعِهِ ضَرَرًا خِلاَفًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya), maksudnya ketika butuh menyambungnya karena pecah dan semisalnya, (dengan najis), maksudnya tulang najis, meski najis *mughalazah*. Dan sama dengan hal tersebut, bahkan lebih, adalah meminyaki dengan minyak najis *mughalazhah*, atau mengikat dengan ikat najis *mughalazah*, (karena tidak ada tulang suci), yang layak dijadikan penyambung, (maka ia dianggap *uzdur*) dalam penyambungan dengan tulang najis tersebut. Maka shalatnya sah beserta tulang najis itu karena kondisi darurat. Dan ia tidak wajib mencopotnya ketika menemukan tulang suci, seperti dalam kitab *al-Raudhah*. Maksudnya meski tidak khawatir bahaya, berbeda dengan sebagian ulama *mutaakhkhirin*.

6. *Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*[4]

قَالَ الْحَلَبِيُّ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إِلَّا مُبِيحَ التَّيَمُّمِ فَقَطْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالِامْتِهَانُ دَائِمٌ وَجَزَمَ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى الْخَطِيبِ بِالْجَوَازِ وَنَصُّهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا عَظْمُ الْأَدَمِيِّ قُدِمَ عَظْمُ نَحْوِ الْحَرْبِيِّ كَالْمُرْتَدِ ثُمَّ الذِّمِّيِّ ثُمَّ الْمُسْلِمِ

Al-Halabi berkata: "Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas *udzur* yang memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus

---

[3] Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1967), Jilid II, h. 21.

[4] Husain al-Rasyidi, *Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 26-27.

terjadi. Dan *al-Madabighi* dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: "Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang *kafir harbi* seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang *kafir dzimmi*, dan baru tulang mayit muslim.

4. *Referensi Lain*
   a. *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz III, h. 125.
   b. *Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib*, Juz I, h. 172.
   c. *Hasyiyah Qulyubi wa 'Umairah*, Juz I, h. 182.

399. Kontrasepsi dengan Vaksin yang Bahan Mentahnya Sperma Lelaki

S. Sebuah rekayasa laboratoris telah mampu menghasilkan vaksin yang bahan mentahnya adalah sperma laki-laki. Vaksin tersebut dimanfaatkan untuk proses pengebalan (imunisasi), agar wanita yang telah memperoleh injeksi vaksin tersebut diharapkan tidak hamil.

Dalam rangka menyukseskan program KB, bolehkah melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan menggunakan cara tersebut?

J. Melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan cara imunisasi menggunakan injeksi vaksin yang bahan mentahnya sperma laki-laki adalah boleh, karena sifat *istiqdzar* (menjijikkan) sudah luntur dan sudah hilang.

Catatan: Tidak boleh mengeluarkan air sperma dengan cara yang tidak *muhtaram*.

Keterangan, dari kitab:

1. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*[5]

(قَوْلُهُ وَلاَ لِاسْتِقْذَارِهَا) أَيْ وَلَيْسَ تَحْرِيْمُ تَنَاوُلِهَا لِاسْتِقْذَارِهَا وَهَذَا الْقَيْدُ لِإِخْرَاجِ الْمَنِيِّ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ حَرُمَ تَنَاوُلُهُ لَكِنْ لِاسْتِقْذَارِهِ فَلَيْسَ بِنَجِسٍ، وَمَحَلُّ حُرْمَةِ تَنَاوُلِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَعْدَنِهِ

(Ungkapan Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi: "Dan bukan karena menjijikkannya."), maksudnya keharaman mengkonsumsinya bukanlah karena menjijikkannya. Ketentuan ini untuk mengecualikan mani dan semisalnya, yaitu ingus dan ludah seperti yang akan disebutkannya.

---

[5] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 103.

Sebab, meski air mani haram dikonsumsi, namun karena menjijikkannya. Maka air mani tidak najis, dan keharaman mengkonsumsinya itu bila keluar dari tempat keluarnya.

2. *Tuhfah al-Thullab* dan *Hasyiyah al-Syarqawi*[6]

(وَإِنْ كَانَ) غَيْرُ الْمُسْكِرِ (طَاهِرًا فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا) بِمَنْ يَتَنَاوَلُهُ كَالسُّمِّ (أَوْ مُسْتَقْذَرًا غَالِبًا كَمُخَاطٍ فَحَرَامٌ) تَنَاوُلُهُ لِتَضَرُّرِهِ بِهِ وَاسْتِقْذَارِهِ لَهُ ... (فَإِنِ انْتَفَى ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِمَّا يَقْتَضِيْ التَّحْرِيْمَ (فَحَلاَلٌ)

(قَوْلُهُ مِمَّا يَقْتَضِيْ التَّحْرِيْمَ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ اْلإِسْكَارُ وَاْلإِسْتِقْذَارُ وَاْلإِضْرَارُ وَالنَّجَاسَةُ

(Dan bila) minuman yang tidak memabukkan itu (suci, maka bila membahayakan) pada orang yang mengkonsumsinya seperti racun, (atau secara umum menjijikkan seperti ingus, maka haram) mengkonsumsinya karena bahaya dan menjijikkannya ... (Bila hal itu tidak ada), maksudnya unsur yang membuatnya haram, (maka halal).

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Unsur yang membuatnya haram."), yaitu ada 4, yaitu memabukkan, menjijikkan, membahayakan dan najis.

4. *Referensi Lain*
   a. *Al-Syarqawi*, Juz II, h. 332.
   b. *Al-Majmu'*, Juz II, h. 556.
   c. *Hasyiyah al-Syarwani 'ala al-Tuhfah*, Juz VIII, h. 241.

400. Menitipkan Sperma Suami dan Indung Telur ke Rahim Perempuan Lain

S. Pasangan suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun ternyata kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Tetapi dengan kemajuan teknologi modern, keinginan pasangan tersebut dapat diwujudkan dengan cara menitipkan sperma suami dan indung telur istri ke rahim perempuan lain dengan akad sewa.

a. Bagaimana hukum menyewakan rahim untuk kepentingan tersebut di atas?
b. Kepada siapa nisbah anak tersebut dalam hal nasab, kewalian, hukum waris dan hadhanah?

---

[6] Zakarita al-Anshari dan Abdullah al-Syarqawi, *Tuhfah al-Thullab* dan *Hasyiyah al-Syarqawi*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t. th), Juz II, h. 451.

J. a. Tidak sah dan haram.
   b. 1. Dalam hal nasab, kewalian, waris dan *hadhanah* tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibn Hajar, karena masuknya tidak *muhtaram*.
      2. Yang menjadi ibu secara *syar'i* adalah:
         2.1. Apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut adalah pemilik indung telur.
         2.2. Jika dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak itu adalah pemilik rahim (yang melahirkan).

Keterangan, dari kitab:

1. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*[7]

وَقَالَ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ الدُّنْيَا حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحْمٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ

Dan Abu Bakr bin Abi al-Dunya berkata: "'Ammar bin Nashr bercerita kepadaku: "Baqayyah bercerita kepadaku, dari Abu Bakr bin Abi Maryam, dari al-Haitsam bin Malik al-Tha'i dari Nabi Saw., beliau bersabda: "*Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya.*"

2. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*[8]

وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ أَخِيْهِ

Dan diriwayatkan dari Rasulullah Saw.: "*Barangsiapa yang beriman pada Allah Swt. dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali mengalirkan spermanya (berzina) di tanaman (istri) saudaranya.*" (H. R. Ibn Syaibah)

3. *Hasyiyah 'Ali Sibramallisi 'ala Nihayah al-Muhtaj*[9]

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتْ امْرَأَةٌ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً فَاسْتَدْخَلَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لَا يَكُونُ ابْنًا لِلثَّانِيَةِ وَلَا

---

7 Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim,* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 327.

8 Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz II, h. 25.

9 Ali Syibramalli si, *Hasyiyah 'Ali Sibramallisi* pada *Nihayah al-Muhtaj,* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 431.

تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَمَنِيِّهَا بَلْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ فَهُوَ وَلَدٌ لَهُمَا

(Pernyataan Syaikh Syamsuddin al-Ramli: "Begitu pula bila seorang lelaki mengusap penisnya.") memberi pemahaman bahwa bila seorang wanita melahirkan segumpal daging atau darah, lalu oleh wanita merdeka atau wanita budak lain dimasukkan ke rahimnya, lalu berkembang hidup dan terus hidup sehingga ia melahirkannya berupa bayi, maka bayi itu tidak menjadi anak bagi wanita kedua itu, dan si wanita budak tidak menjadi *mustauladah* lelaki yang menyetubuhi, bila wanita yang disetubuhi adalah seorang budak. Sebab bayi itu tidak berasal dari mani si lelaki yang menyetubuhi dan mani si wanita budak, namun dari si lelaki yang menyetubuhi dan perempuan yang disetubuhi -wanita pertama-. Maka ia adalah anak mereka berdua.

4. *Hasyiyah al-'Ubbadi*[10]

(قَوْلُهُ وَاسْتِدْخَالِهِ) خِلاَفًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلاَ أَثَرَ لِوَقْتِ اسْتِدْخَالِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَإِنْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنِ الْأَصْحَابِ اعْتِبَارَ حَالَةِ الْإِنْزَالِ وَالاسْتِدْخَالِ فَقَدْ صَرَّحُوْا بِأَنَّهُ لَوِ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ فَأَمْنَى ثُمَّ اسْتَدْخَلَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ عَالِمَةٌ بِالْحَالِ أَوْ أَنْزَلَ فِيْ زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَهُ مَثَلاً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ

(Pernyataan Ibn Hajar al-Haitami: "Dan waktu memasukkan mani.") berbeda dengan kitab *Nihayah al-Muhtaj,* redaksinya yaitu: "Dan waktu memasukkan mani itu tidak berdampak apapun, seperti yang fatwa al-Walid -Syihabuddin al-Ramli-, meski al-Mawardi mengutip pendapat *Ashhab Syafi'i* tentang pertimbangan waktu keluar dan masuknya mani. Sebab mereka terang-terangan berkata: "Bila seorang laki-laki bercebok dengan batu, lalu keluar mani. Lalu oleh seorang perempuan lain yang mengetahui peristiwa tersebut mani itu dimasukkan dalam rahimnya, atau si lelaki itu mengeluarkan mani di rahim istrinya, kemudian si istri melakukan lesbi (hubungan seksual sesama jenis), umpamanya dengan anak perempuan si lelaki itu, kemudian si anak perempuan itu melahirkan bayi, maka nasab bayi itu ditemukan pada si lelaki itu.

5. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*[11]

---

[10] Ahmad bin Qasim al-'Ubbadi, *Hawasayi al-Ubbadi* pada *Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi,* (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IX, h. 328.

[11] Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, *Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami ' ala al-Khatib,* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 298.

الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ حَالَ خُرُوْجِهِ فَقَطْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ حَالَ الدُّخُوْلِ

Al-hasil, maksud sperma *muhtaram* (terhomat) adalah saat keluarnya saja, menurut yang dipedomani al-Ramli, meskipun tidak *muhtaram* saat masuk (ke vagina wanita lain).

6. Referensi Lain

- *a.* *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, Juz VI, h. 211.
- *b.* *I'anatuth Thalibin*, Juz IV, h. 38.
- *c.* *Hasyiyah al-Syarwani*, Juz VIII, h. 231.
- *d.* *Al-Bajuri*, Juz II, h. 26, 181dan 172.
- *e.* *Al-Bujairimi 'alal Khatib*, Juz IV, h. 38.
- *f.* *Bughyatul Mustarsyidin*, Juz, h. 238.
- *g.* *Tuhfatul Muhtaj*, Juz VII, h. 299 dan 303.
- *h.* *Asnal Mathalib*, Juz VII, h. 389.
- *i.* *Nihayatul Muhtaj*, Juz VIII, h. 421.
- *j.* *Fathul Wahhab*, Juz I, h. 247.
- *k.* *Al-Bujairimi 'alal Manhaj*, Juz IV, h. 178.
- *l.* *Al-Muhadzdzab*, Juz I, h. 349.
- *m.* *Tafsir al-Razi*, Juz X, h. 28.
- *n.* *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, h. 681.

401. Melontar Jumrah pada Hari Tasyriq Sebelum Tergelincir Matahari

S. Salah satu sebab dari tragedi "jamarat" di Mina beberapa waktu lalu karena adanya asumsi di kalangan masyarakat umum bahwa melontar jumrah harus dilakukan setelah zawalusy syamsi. Sementara itu, jumlah hujjaj yang bertambah terus tiap tahun tidak dapat diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang cukup. Tragedi jamarat terjadi, karena semua orang hendak melontar jumrah setelah zawal, sementara tempat melontar jumrah tidak cukup luas untuk menampung jumlah hujjaj yang begitu besar, sehingga terjadilah desak-desakan. Bagaimana hukum melontar jumrah Qabl al-zawal?

J. Hukum melontar jumrah *qabl al-zawal* terhitung sejak terbit fajar adalah diperbolehkan menurut Imam Rafi'i yang didukung oleh Imam Isnawi. Qaul tersebut dinilai *dha'if*, namun boleh diamalkan.

Keterangan, dari kitab:

1. *Tuhfah al-Muhtaj*[12]

وَجَزْمُ الرَّافِعِيِّ بِجَوَازِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ كَالْإِمَامِ ضَعِيْفٌ وَإِنِ اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمَعْرُوْفُ مَذْهَبًا وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِيْ جَوَازُهُ مِنَ الْفَجْرِ

Kemantapan al-Rafi'i dengan kebolehan melempar jumrah *qabl al-zawal* (sebelum matahari condong ke barat) seperti al-Imam al-Haramain itu pendapat *dha'if* (lemah), meski dipedomani oleh al-Isnawi dan ia kira pendapat itu adalah pendapat populer dalam mazhab. Maka berdasar pendapat *dha'if* tersebut, semestinya boleh melempar jumrah mulai fajar.

2. *Syarh Bafadhal*[13]

وَقِيْلَ يَصِحُّ رَمْيُ الْحَاضِرِ قَبْلَ الزَّوَالِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَاعْتَمَدَهُ

Dan menurut satu pendapat, sah melempar jumrah *qabl al-zawal* bagi orang *hadhir* (yang tinggal di makkah) besertaan hukum makruh. Al-Rafi'i mantap dengan pendapat itu dan ia nilai *mu'tamad*.

3. *Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khatib*[14]

وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ بِخِلَافِ رَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِزَوَالِ شَمْسِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَجَوَّزَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرَّافِعِيُّ أَنْ يَكُوْنَ رَمْيُ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ

Waktu melempar *jumrah 'aqabah* itu dimulai tengah malam hari kurban, berbeda dengan melempar *jumrah* pada hari *tasyriq* (11, 12, 13 *Dzu al-Hijjah*), maka waktu masuknya dengan matahari condong ke barat dengan kesepakatan Imam mazhab empat. Imam al-Haramain dan al-Rafi'i memperbolehkan pelemparan *jumrah* hari *tasyriq* pada *qabl al-zawal* (sebelum matahari condong ke barat), dan al-Isnawi menilainya *mu'tamad*. Pendapat itu adalah pendapat *dha'if*.

4. *I'anah al-Thalibin*[15]

وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُهُ فِيْهَا أَيْضًا وَجَوَازُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ بَلْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَالَ أَنَّهُ

---

12 Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* pada *Hawasyai al-Syirwani wa al-'Ubbadi*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th), Jilid IV, h. 138.

13 Bafadhal, *Syarh Bafadhal* pada *Mauhibah Dzi al-Fadhl*, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 831.

14 Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khatib* pada *'Umdah al-Abrar*, (Makah : Musthafa al-Amirah, t. th.), h. 22.

15 Muhammad bin Syaththa al-Dimyati, *I'anah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th) Juz II, h. 307.

الْمَعْرُوْفُ بِجَوَازِ رَمْيِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَعَلَيْهِ فَيَدْخُلُ بِالْفَجْرِ

Dan pendapat *mu'tamad* adalah boleh melempar *jumrah* (hari *tasyriq* yang belum dilempar pada waktunya) di malam harinya pula, dan boleh melemparnya *qabl al-zawal*. Bahkan, al- Rafi'i mantap dengannya dan al-Isnawi mengikutinya. Al-Isnawi berkata: "Pendapat yang populer adalah boleh melempar *jumrah* masing-masing hari *qabl al-zawal*, maka waktu melempar *jumrah* masuk dengan terbitnya fajar.

5. *Bughyah al-Mustarsyidin*[16]

(فَائِدَةٌ) قَالَ فِيْ فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ لَيْسَ لِمَنْ قَرَأَ كِتَابًا وَلَمْ يَتَأَهَّلْ لِلإِفْتَاءِ أَنْ يُفْتِيَ إِلاَّ فِيْمَا عُلِمَ مِنْ مَذْهَبِهِ عِلْمًا جَازِمًا كَوُجُوْبِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوْءِ وَنَقْضِهِ بِمَسِّ الذَّكَرِ. نَعَمْ إِنْ نَقَلَ لَهُ الْحُكْمَ عَنْ مُفْتٍ آخَرَ أَوْ عَنْ كِتَابٍ مَوْثُوْقٍ بِهِ جَازَ وَهُوَ نَاقِلٌ لاَ مُفْتٍ

(Faidah) Dalam *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra* Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Bagi orang yang bisa membaca suatu kitab dan tidak punya keahlian berfatwa maka tidak boleh berfatwa, kecuali dalam hal yang diketahui dari madzhabnya dengan pengetahuan yang mantap, seperti kewajiban niat dalam wudhu dan batalnya wudhu sebab menyentuh penis. Memang begitu, namun bila ia mengutip untuk orang awam suatu hukum dari seorang mufti lain atau dari kitab terpercaya, maka boleh, namun ia sebagai pengutip (saja), bukan mufti.

5. *Syarh al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami'*[17]

(وَرَابِعُهَا) يَجُوزُ لِلْمُقَلِّدِ الْإِفْتَاءُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا) عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ (لِأَنَّهُ نَاقِلٌ) لِمَا يُفْتِي بِهِ عَنْ إِمَامِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِنَقْلِهِ عَنْهُ وَهَذَا الْوَاقِعُ فِي الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ

(Dan yang keempat dari pendapat tentang berfatwa) adalah bagi *muqallid* -bukan mujtahid- boleh berfatwa, (meski ia tidak mampu) mampu men*tafri'*-menggali hukum dari *nash* imam madzhabnya- dan men*tarjih* -menilai unggul suatu pendapat dari selainnya-, (sebab ia merupakan pengutip), hukum yang difatwakan dari imamnya, meski ia tidak menjelaskan pengutipannya dari imam tersebut. Hal seperti ini terjadi di masa-masa belakangan ini.

6. *Al-Fawaid al-Makkiyah*[18]

---

16 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 7.

17 Al-Mahalli, *Syarh al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami'* pada *Hasyiyah al-'Aththar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Juz II h. 438.

18 Alawi al-Saqaf, *al-Fawaid al-Makkiyah* pada *Sab'ah Kutub Mufidah*, h. 44 dan 61.

وَكَذَا يَجُوْزُ الْأَخْذُ وَالْعَمَلُ لِنَفْسِهِ بِالْأَقْوَالِ وَالطُّرُقِ وَالْوُجُوْهِ الضَّعِيْفَةِ إِلاَّ بِمُقَابِلِ الصَّحِيْحِ فَإِنَّ الْغَالِبَ فِيْهِ فَاسِدٌ. وَيَجُوْزُ الْإِفْتَاءُ بِهِ لِلْغَيْرِ بِمَعْنَى الْإِرْشَادِ

Demikian halnya boleh mengambil dan mengamalkan untuk diri sendiri *qaul-qaul, riwayat-riwayat* dan *wajh-wajh dha'if,* kecuali dengan *muqabil al-shahih*. Sebab, pada umumnya dalam *muqabil al-shahih* itu adalah pendapat yang *fasid* (rusak) dalam merupakan pendapat yang rusak atau tidak benar. Dan boleh berfatwa dengan *muqabil al-shahih* dalam pengertian memberi petunjuk.

7. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*[19]

وَخَالَفَ فِيْهِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ فَقَالاَ لاَ يَجُوْزُ قَبْلَ الزَّوَالِ مُطْلَقًا وَرَخَّصَ الْحَنَفِيَّةُ فِيْ الرَّمْيِ فِيْ يَوْمِ النَّفَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَالَ إِسْحَقُ إِنْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَعَادَ إِلاَّ فِيْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَيُجْزِئُهُ

Dan dalam kesunnahan melempar *jumrah* hari *nahr* (10 Dzu al-Hijjah) setelah *zawal,* Atha' dan Thawus tidak sepakat. Mereka berdua berkata: "Tidak boleh melempar *jumrah* sebelum *zawal* secara mutlak. Ulama madzhab Hanafiyah memberikan dispensasi boleh melempar *jumrah* pada hari *nafr* (12 dan 13 Dzul al-Hijjah) sebelum *zawal*. Dan Ishaq berkata: "Jika seseorang melempar *jumrah* sebelum *al-zawal,* ia harus mengulangi kembali, kecuali pada hari ke tiga, maka akan mencukupinya (sah)."

8. *Referensi Lain*
   a. *Itsmid al-'Ainain,* h. 69.
   b. *Al-Tsimar al-Yani'ah,* h. 72.
   c. *Al-Hawasyi al-Madaniyah,* Juz II, h. 260.
   d. *Syarh Muslim,* Juz V, h. 678.
   e. *Al-Majmu',* Juz VIII, h. 282.
   f. *Tarsyih al-Mustafidin,* h. 172.

REKOMENDASI UNTUK PBNU

Berkenaan dengan keputusan *Dar al-Ifta li Haiat Kibar al-Ulama* Kerajaan Arab Saudi perihal waktu pelaksanaan lempar jumrah. Demi untuk menjaga keselamatan (perlindungan jiwa) jamaah haji Indonesia, hendaknya PBNU mengupayakan agar pemerintah Arab Saudi memperbolehkan dan memberi kesempatan kepada jamaah haji Indonesia untuk melempar jumrah sebelum *zawal* (tergelincir) matahari.

Hal ini mengingat:

---

[19] Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), Juz I, h. 576.

1. Fatwa ulama fiqh mazhab Syafi'i (Ibn Hajar al-Haitami dan lain-lain) yang memperkenankan pelaksanaan jumrah sebelum *zawal*.
2. Para petugas Arab Saudi sering kali mendatangi para jamaah di *maktab*nya masing-masing untuk melarang pelaksanaan lempar jumrah sebelum *zawal*.

402. Intervensi Pemerintah dengan Menentukan UMR

S. Seiring dengan meningkatnya proses industrialisasi di negara kita, akhir-akhir ini muncul banyak sekali masalah perburuhan seperti pemogokan, PHK, demonstrasi buruh memprotes masalah itu biasanya muncul dikarenakan sistem upah di negara kita belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan minimum para buruh. Sebab lain, adalah karena para pemilik pabrik tidak menerapkan UMR (Upah Minimum Regional) yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara benar, sehingga muncul konflik antara buruh dan pengusaha. Sementara itu konsep fiqh mengenai perburuhan belum begitu jelas, bahkan parsial.

a. Bagaimana konsep fiqh mengenai hubungan perburuhan, khususnya mengenai pengupahan?

b. Tepatkah Pemerintah melakukan intervensi dengan menentukan UMR (Upah Minimum Regional) tersebut?

c. Bila terjadi gejolak, maka diadakan islah di antara kedua belah pihak, sedangkan pemerintah yang menjadi hakimnya dengan syarat-syarat yang telah ada?

J. a. Konsep fiqh mengenai upah buruh ada dua macam, yaitu:
   1. *Ujrah Musamma* yang ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak (majikan dan buruh).
   2. *Ujrah Mitsl* yang disesuaikan dengan upah standart umum.

   b. Pemerintah dalam menentukan UMR adalah:
   1. Menurut *Jumhur* tidak boleh.
   2. Menurut pendapat yang *dha'if* boleh, dan wajib diikuti apabila *ada maslahah 'ammah*.

   c. Bila terjadi gejolak, maka diadakan *islah* antara kedua belah pihak. Sedangkan pemerintah yang menjadi hakim dengan syarat-syarat yang telah ada.

Keterangan, dari kitab:

1. *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*[20].

[20] Mahmud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 179.

وَأَمَّا شَرْطُ الصِّحَّةِ فَلِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ شَرَائِطُ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ ... وَأَمَّا الَّذِيْ يَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ فَرِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وَالْإِجَارَةُ تِجَارَةٌ لِأَنَّ التِّجَارَةَ تَبَادُلُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَالْإِجَارَةُ كَذَلِكَ وَلِهَذَا يَمْلِكُهَا الْمَأْذُوْنُ وَأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ مَا لَيْسَ بِتِجَارَةٍ فَثَبَتَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تِجَارَةٌ فَدَخَلَتْ تَحْتَ النَّصِّ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ فَلاَ يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَالْهَزْلِ وَالْخَطَاءِ لِأَنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ تُنَافِيْ الرِّضَا فَتَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِجَارَةِ

Adapun syarat keabsahan, maka keabsahan akad *ijarah* (persewaan) ini mempunyai beberapa syarat, sebagiannya terkait dengan pelaku akad. ... Adapun syarat yang terkait dengan pelaku akad adalah kerelaan kedua pelaku akad, karena firman Allah SWT: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kamu."* (QS. al-Nisa': 29). *Ijarah* adalah *tijarah*. Sebab *tijarah* adalah menukar harta dengan harta lain, dan *ijarah* demikian itu. Oleh karenanya, budak yang diizini berbisnis boleh melakukan akad *ijarah*, padahal ia tidak boleh melakukan akad melainkan dengan cara *tijarah*. Maka bisa disimpulkan bahwa *ijarah* adalah *tijarah*. Maka *tijarah* masuk dalam cakupan *nash* al-Qur'an. Dan Nabi Saw. bersabda: *"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya."* Maka akad *ijarah* tidak sah besertaan dengan paksaan, gurauan, dan kesalahan (ketidak sengajaan). Sebab, hal-hal tersebut menafikan kerelaan pelaku akad, maka mencegah keabsahan *ijarah*.

2. *Fath al-'Alam bi Syarh al-A'lam bi Ahadits al-Ahkam*[21]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ غَلاَ السِّعْرُ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُشَرَّفَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّيْ لَأَرْجُوْا أَنْ أَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِيْ بِظُلْمٍ فِيْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ) وَفِيْهِ تَحْرِيْمُ التَّسْعِيْرِ وَلَوْ فِيْ وَقْتِ الْغَلاَءِ وَالْمَعْنَى فِيْهِ التَّضْيِيْقُ عَلَى الْبَائِعِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ إِنْ قُدِرَ السِّعْرُ بِالرُّخْصِ وَعَلَى الْمُشْتَرِيْنَ إِنْ قَدَرَ بِغَيْرِ الرُّخْصِ وَذِكْرُ الدَّمِ وَالْمَالِ مِثَالٌ فَغَيْرُهَا مِنَ الْعَرَضِ وَغَيْرِهِ مِثْلُهَا

[21] Zakaria al-Anshari, *Fath al-'Alam bi Syarh al-A'lam bi Ahadits al-Ahkam*, h. 432.

Diriwayatkan dari Anas Ra., pada masa Rasulullah Saw. di kota Madinah al-Musyarrafah pernah terjadi kenaikan harga-harga barang: "Maka tetapkanlah standar harga barang bagi kami wahai Rasulullah Saw.! Lalu beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah Swt. adalah Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Maha Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah Swt. tanpa seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman yang terkait darah (jiwa) dan harta."* (HR. Abu Dawud dan selainnya, al-Tirmidzi dan Ibn Hibban men*shahih*kannya).

Dalam hadits itu terdapat pengharaman penetapan harga, meski saat kondisi harga-harga sedang naik. *'Illat* dalam hadits tersebut adalah merugikan pedagang bila harga ditetapkan murah, dan merugikan pembeli bila harga ditetapkan tidak murah. Sedangkan penyebutan (kezaliman) darah dan harta merupakan contoh, maka selain keduanya itu sama (Nabi Saw. juga mengharap selamat dari tuntutan kezaliman yang terkait dengan selain darah dan harta).

3. *Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi'*[22]

وَلاَ يَنْبَغِيْ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَ تُسَعِّرُوْا فَإِنَّ اللهَ الْمُسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْعَاقِدِ فَإِلَيْهِ تَقْدِيْرُهُ فَلاَ يَنْبَغِيْ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِحَقِّهِ إِلاَّ إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ ضَرَرُ الْعَامَّةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ

Penguasa tidak berhak menetapkan harga bagi masyarakat sesuai sabda Rasulullah Saw.: *"Janganlah kalian menetapkan harga, sesungguhnya hanya Allah Swt. Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Dzat Yang Maha Memegang dan Maha Melepas."* Selain itu, karena harga suatu barang itu adalah hak pihak yang bertransaksi, maka ketentuan harga diserahkan kepadanya. Maka penguasa tidak boleh mencampuri haknya, kecuali bila terkait dengan keadaan bahaya bagi masyarakat umum, sesuai apa yang kami jelaskan.

4. *Al-Mughni*[23]

وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ بَلْ يَبِيْعُ النَّاسُ أَمْوَالَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُوْنَ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ

Dan bagi penguasa tidak boleh menentukan harga bagi masyarakat. Namun (membiarkan) masyarakat memperjualbelikan harta mereka sesuai

---

[22] Ali al-Marghinani, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi'*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Jilid IV, h. 94.

[23] Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Beirut dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Jilid IV, h. 303.

pada harga yang dipilihnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

5. *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*[24]

الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْمَنَاهِيْ مَا لاَ يَقْتَضِيْ الْفَسَادَ ... وَمِنْهَا التَّسْعِيْرُ وَهُوَ حَرَامٌ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ عَلَى الصَّحِيْحِ. وَالثَّانِي يَجُوْزُ فِيْ وَقْتِ الْغَلاَءِ دُوْنَ الرُّخْصِ. قَالَ: وَإِذَا سَعَرَ الإِمَامُ عَلَيْهِ فَخَالَفَ اسْتَحَقَّ التَّعْزِيْرَ

Bagian kedua tentang larangan-larangan yang tidak menimbulkan kerusakan ... di antaranya adalah penetapan harga. Han itu haram di setiap waktu menurut pendapat *al-shahih*. Pendapat kedua menyatakan penetapan harga itu boleh di saat harga barang sedang mahal, bukan di saat sedang murah. Jika penguasa sudah menetapkan harga di saat harga sedang mahal, lalu ada yang melanggarnya, maka ia berhak dihukum.

5. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*[25]

قَالَ الْعَلاَّمَةُ أَبُوْ الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ شَمْسُ الْحَقِّ أَبَادِيْ فِيْ شَرْحِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِالْحَدِيْثِ وَمَا وَرَدَ فِيْ مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيْمِ التَّسْعِيْرِ وَإِنَّهُ مَظْلَمَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُوْنَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَالتَّسْعِيْرُ حِجْرٌ عَلَيْهِمْ وَالإِمَامُ مَأْمُوْرٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَ نَظْرُهُ فِيْ مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِيْ بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظْرِهِ فِيْ مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيْرِ الثَّمَنِ وَإِذَا تَقَابَلَ الأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِيْنُ الْفَرِيْقَيْنِ مِنَ الاجْتِهَادِ لِأَنْفُسِهِمْ وَإِلْزَامُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ لاَ يَبِيْعَ بِمَا لاَ يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ

Al-'Allamah Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Abadi dalam menjelaskan hadits ini mengatakan: "Hadits itu dan hadits-hadits lain yang senada dijadikan dalil bagi keharaman penetapan harga, dan bahwa penetapan harga merupakan tindakan zalim. Hal ini mengingat, bahwa masyarakat merupakan pihak yang menguasai harta, dan penetapan harga merupakan pembatasan kewenangan. Sementara penguasa diperintahkan melindungi kemaslahatan umat Islam. Tidaklah pandangannya tentang kemaslahatan pembeli dengan memurahkan harga itu lebih utama dari pada pandangannya tentang kemaslahatan penjual dengan meninggikan

---

[24] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t. th.), Jilid III, h. 211.

[25] Muhammad Syamsul Haq Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), Jilid IX, h. 230.

harga. Ketika terdapat kontradiksi antara dua hal tersebut, maka mereka harus diberi kesempatan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mewajibkan pemilik barang dagangan untuk menjualnya dengan harga yang tidak sesuai kehendaknya, itu bertentangan dengan firman Allah SWT: *"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ..."* (QS. al-Nisa': 29). Pendapat inilah yang dianut *Jumhur* ulama.

6. *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*[26]

(وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ إِلْزَامَهُمْ) أَيْ الْبَاعَةِ (الْمُعَاوَضَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِنَّهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى وَلَا تَتِمُّ مَصْلَحَةُ النَّاسِ إِلَّا بِهَا كَالْجِهَادِ ...

(Dan al-Syaikh -Ibn Taimiyah- mengharuskan mereka), maksudnya para pelaku akad jual beli untuk melakukan (pertukaran dengan *tsaman al-mitsl* -harga standar-, dan sungguh hal itu tidak diperdebatkan, sebab merupakan kemaslahatan publik karena hak Allah Ta'ala, dan kemaslahatan publik tidak tidak akan sempurna kecuali dengan pertukaran dengan harga standar tadi, seperti halnya jihad ...

7. *Tuhfah al-Ahwadzi 'ala Syarh al-Tirmidzi*[27]

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلإِمَامِ التَّسْعِيْرُ

Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa penguasa berhak menetapkan harga.

8. *'Aridhah al-Ahwadzi fi Syarh al-Tirmidzi*[28]

وَالتَّسْعِيْرُ عَلَى النَّاسِ إِذَا خِيْفَ عَلَى أَهْلِ السُّوْقِ أَنْ يُفَسِّرُوْا أَحْوَالَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ بِظَاهِرِ الْحَدِيْثِ لاَ يُسَعَّرُ عَلَى أَحَدٍ. وَالْحَقُّ التَّسْعِيْرُ وَضَبْطُ الْأَمْرُ عَلَى قَانُوْنٍ لاَ يَكُوْنُ فِيْهِ مَظْلَمَةٌ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ وَذَلِكَ قَانُوْنٌ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ بِالضَّبْطِ وَالْأَوْقَاتِ وَمَقَادِيْرِ الْأَحْوَالِ وَحَالِ الرِّجَالِ. وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. وَمَا قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ حَقٌّ وَمَا فَعَلَهُ حُكْمٌ لَكِنْ عَلَى قَوْمٍ صَحَّ ثَبَاتُهُمْ وَاسْتَسْلَمُوْا إِلَى رَبِّهِمْ وَأَمَّا قَوْمٌ قَصَدُوْا أَكْلَ النَّاسِ وَالتَّضْيِيْقَ عَلَيْهِمْ فَبَابُ اللهِ أَوْسَعُ وَحُكْمُهُ أَمْضَى

---

[26] Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), Jilid III, h. 187.

[27] Abu al-'Ala al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi 'ala Syarh al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Jilid IV, h. 452.

[28] Ibn al-'Arabi, *Tuhfah al-Ahwadzi 'ala Syarh al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Jilid VI, h. 54.

Penetapan harga pada masyarakat itu (boleh) jika dikhawatirkan pelaku pasar akan menafsirkan ketaatan kaum muslimin (dengan penafsiran yang negatif). Semua ulama berdasarkan *zhahir* hadits, yaitu tidak memperbolehkan penetapan harga pada siapapun. Namun yang benar, adalah penetapan harga itu (boleh). Parameternya adalah berdasarkan undang-undang yang tidak memuat kezhaliman terhadap pihak-pihak yang terkait, dan undang-undang itu tidak diketahui kecuali dengan memperhatikan waktu dan fluktuasi situasi dan keadaan masyarakat.

Apa yang disabdakan Nabi Saw. (yang melarang penetapan harga) itu benar dan yang dilakukannya merupakan ketetapan hukum. Namun, hal itu berlaku bagi suatu komunitas masyarakat yang beriman teguh dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan komunitas yang bermaksud untuk memangsa sesama anggota masyarakat dan mempersulit mereka, maka pintu Allah Swt. sangat luas dan hukumNya terus berjalan.

9. *Referensi Lain*
   a. *Hasyiyah al-Syarwani*, Juz VII, h. 17.
   b. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Abi Ya'la*.
   c. *Nihayah al-Muhtaj*, Juz III, h. 473.

403. Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari di Luar Rumah

S. Angkatan kerja wanita mendominasi pekerjaan yang tidak banyak memerlukan keahlian. Jumlah mereka juga sangat besar. Di pabrik yang bekerja dengan mesin besar dan full time (24 jam), berlaku pembagian sift (giliran) setiap 8 jam, termasuk malam hari. Sift malam hari mengundang kerawanan, khususnya bagi pekerja wanita. Bagaimana hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah?

J. Hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah, hukumnya adalah haram, kecuali:

1. Aman dari fitnah dan mendapat izin dari suami dan atau wali, maka hukumnya boleh.
2. Diduga terjadi fitnah, maka hukumnya haram dan dosa.
3. Takut terjadi fitnah, maka hukumnya makruh.

Keterangan, dari kitab:

1. *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*[29]

---

[29] Badruddin al-'Aini, *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Mesir: al-Muniriyah, t. th.), Juz XX, h. 218.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ فِيْ الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَالشَّرْطُ فِيْ الْجَوَازِ فِيْهِمَا الْأَمْنُ مِنَ الْفِتْنَةِ

Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar al-Khaththab, bahwa Nabi Saw. bersabda: "*Jika istri salah seorang dari kalian meminta izin pergi ke mesjid, maka janganlah melarangnya.*" (HR. Bukhari). Keserasian hadits ini dengan judul bab yang dibuat Imam Bukhari (Bab Permintaan Izin Istri kepada Suaminya untuk Pergi ke Masjid dan ke Selainnya), adalah wanita tersebut pergi ke masjid, dan perginya ke selain masjid dengan di*qiyas*kan padanya. Persyaratan bagi kebolehan pergi mesjid dan luar mesjid bagi seorang wanita adalah aman dari fitnah.

2. *Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq*[30]

قَالَ فِيْ الزَّوَاجِرِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِصَرِيْحِ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ وَيَنْبَغِيْ حَمْلُهُ لِيُوَافِقَ عَلَى قَوَاعِدِنَا عَلَى مَا إِذَا تَحَقَّقَتِ الْفِتْنَةُ أَمَّا مُجَرَّدُ خَشْيَتِهَا فَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُوْهٌ وَمَعَ ظَنِّهَا حَرَامٌ غَيْرُ كَبِيْرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

Dalam kitab *al-Zawajir* Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Sesuai dengan kejelasan hadits-hadits ini, maka (keluarnya wanita dari rumah) termasuk dosa besar. Agar pernyataan ini sesuai dengan kaidah-kaidah kita (madzhab Syafi'i), maka harus dipahami dalam keadaan jika memang benar-benar akan terjadi fitnah. Sementara jika hanya sekedar terdapat kekhawatiran terjadinya fitnah, maka hukumnya makruh. Sedangkan jika disertai dengan dugaan kuat adanya fitnah, maka hukumnya haram, namun bukan dosa besar.

3. *Fath al-Wahhab* dan *Futuhat al-Wahhab*[31]

وَيُكْرَهُ حُضُوْرُهُنَّ الْمَسْجِدَ فِيْ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إِنْ كَانَ مُشْتَهَاةً خَوْفَ الْفِتْنَةِ

(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ حُضُوْرُهُنَّ) أَيْ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْحَلِيْلُ. اهـ ح ل ... إِلَى أَنْ قَالَ ... وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ حَلِيْلٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ هُمَا فِيْ أَمَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ وَمَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ مِنْهَا أَوْ عَلَيْهَا اِنْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُكْرَهُ حُضُوْرُهُنَّ الْمَسْجِدَ) أَيْ مَحَلَّ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِ الرِّجَالِ فَذِكْرُ الْمَسْجِدِ وَالرِّجَالِ لِلْغَالِبِ

---

[30] Muhammad Salim Bafadhal, *Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq*, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Juz VI, h. 125.

[31] Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, *Fath al-Wahhab* dan *Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 416-417.

Dimakruhkan wanita datang ke mesjid berjamaah dengan laki-laki, jika wanita tersebut mempesona karena khawatir timbulnya fitnah.

(Pernyataan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Dimakruhkan wanita datang.") maksudnya, *makruh tahrim* jika si suami tidak mengizinkan. Demikian menurut al-Halabi ... Haram bagi wanita tanpa izin wali, suami, tuan atau keduanya bagi budak wanita yang sudah bersuami, dan dalam keadaan khawatir timbulnya fitnah dari atau yang membahayakannya.

(Pernyataan beliau: "Dimakruhkan wanita datang."), maksudnya datang ke mesjid tempat berjamaah walaupun tidak ada laki-laki di sana. Penyebutan mesjid dan kaum laki-laki hanya berdasar kebiasaan saja.

4. *Fath al-Mu'in* dan *I'anah al-Thalibin*[32]

وَمِنْهَا إِذَا خَرَجَتْ لِاكْتِسَابِ نَفَقَةٍ بِتِجَارَةٍ أَوْ سُؤَالٍ أَوْ كَسْبٍ إِذَا عَسُرَ الزَّوْجُ

(قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ يَجُوْزُ الْخُرُوْجُ لِأَجْلِهَا ... وَقَوْلُهُ أَوْ سُؤَالٍ أَيْ سُؤَالِ نَفَقَةٍ أَيْ طَلَبِهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ

Dan di antaranya, **jika keluarnya** itu untuk mencari nafkah dengan berdagang, meminta atau bekerja ketika suami melarat -tidak mampu memberi nafkah-.

(Pernyataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan di antaranya.") maksudnya adalah dari beberapa hal yang memperbolehkan wanita keluar rumah ... (Dan pernyataan beliau: "Atau meminta.") maksudnya adalah meminta nafkah, maksudnya mencari nafkah dengan cara mencari sedekah.

5. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*[33]

أَنَّ الظَّنَّ بِالْمَفْسَدَةِ وَالضَّرَرِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَصْدِ إِلَيْهِ فَالْأَصْلُ الْجَوَازُ مِنَ الْجَلْبِ أَوِ الدَّفْعِ وَقَطْعُ النَّظْرِ عَنِ اللَّوَازِمِ الْخَارِجِيَّةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ تُسَبِّبُ مَفْسَدَةً مِنْ بَابِ الْحِيَلِ أَوْ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ مُنِعَ مِنْ هذِهِ الْجِهَةِ لَا مِنْ جِهَةِ الْأَصلِ

Sungguh *zhan* (dugaan kuat) tentang *mafsadah* dan bahaya tidak bisa diposisikan sebagai *mafsadah* dan bahaya tersebut. Sebab, hukum asal adalah diperbolehkan mengupayakan kebaikan dan menolek bahaya, serta tanpa memandang konsekuensi eksternal (kharijiyah). Kecuali ketika suatu maslahat menyebabkan *mafsadah* dari sisi *hilah* (rekayasa)

---

[32] Zainuddin al-Malibari dan Muhammad Syaththa al-Dimyathi, *Fath al-Mu'in* dan *I'anah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid II, h. 73-74.

[33] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: al-Madani, t.th.), Juz II, h. 265.

atau dari sisi tolong-menolong, maka *maslahat* tersebut dicegah (tidak diperbolehkan) dari kedua sisi ini, bukan dari hukum asalnya.

6. *Referensi Lain*
   a. *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz II, h. 252.
   b. *Nihayah al-Muhtaj*, Juz II, h. 140
   c. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, Juz I, h. 203.

404. Akad TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi)

S. Menurut Inpres 9/75 berlaku sistem TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). Pemilik tanah memperoleh uang tunggu, sedangkan bagi hasil dikeluarkan setelah penetapan rendemen. Tapi, pada kenyataannya proses penetapan rendemen tersebut dilakukan secara sepihak, yakni oleh pemilik pabrik gula, sementara petani sendiri seringkali dirugikan.

a. Bagaimana hukum akad TRI?

b. Sahkah penetapam bagi hasil dengan cara tersebut?

J. 1. Hukum akad TRI ada yang *fasidah* sesuai dengan keputusan Muktamar ke-28, masalah soal nomor 390, di samping itu dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi *ikrah* (pemaksaan) terhadap peserta TRI.

Tetapi juga ada yang tidak *fasidah*, yaitu petani hutang modal ke bank atau pihak lain, kemudian tebunya digilingkan ke pabrik gula tersebut dengan akad *ijarah*, menurut kebanyakan Hanabilah dan satu *qaul* dari Hanafiyah. Namun pendapat tersebut dinyatakan *dha'if* oleh Ibn Qudamah. Dengan catatan harus ada lembaga yang membantu petani untuk mengontrol penetapan rendement, penimbangan dan lain-lain, guna menghilangkan unsur *gharar*.

2. Penetapan bagi hasil dengan cara tersebut hukumnya sah sesuai dengan jawaban di atas.

Catatan: Tentang hukumnya *Qardh tafsil* seperti dalam *Ahkamul Fuqaha.*

PRAKTEK PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI

Program Penyelenggaraan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) melalui proses:

1. Langkah pertama adalah membentuk kelompok. Prosesnya beberapa petani yang lokasi tanahnya mendapat giliran untuk ditanami tebu, berkumpul untuk bersepakat membentuk kelompok, yang strukturnya ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketua kelompok berfungsi untuk mewakili anggota kelompoknya dalam segala urusan yang

berkaitan dengan pihak luar.

2. Langkah berikutnya adalah mengurus izin penanaman kepada instansi yang terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua kelompok.
3. Setelah mendapat izin, Ketua kelompok dapat mengajukan kredit pembiayaan tanaman dan biaya hidup, yang telah diatur melalui SK Bupati kepada KUD, yang pembayarannya setelah selesai penebangan.
4. Hasil gula petani digiling di pabrik gula yang telah ditentukan. Pabrik gula dalam hal ini berfungsi menjual jasa penggilingan kepada petani, yang bagi hasilnya; pabrik gula kurang lebih 38 %, sedang petani kurang lebih 62 % (ada kemungkinan menurut rendemen).
5. Hasil gula petani yang 98 % dijual kepada DOLOG dengan harga yang ditentukan. Sedang 2 % dapat diambil dalam bentuk natura.
6. Penjualan gula petani kepada DOLOG diwakili dan dikoordinir oleh KUD, kemudian uang diserahkan kepada masing-masing kelompok (diwakili oleh ketuanya) setelah memenuhi kewajiban kelompok, antara lain membayar hutang, membayar biaya tebang dan lain-lain.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Anwar li A'mal al-Abrar*[34]

وَيُشْتَرَطُ أَنْ لاَ تَكُوْنَ الْأُجْرَةُ شَيْئًا يَحْصُلُ بِعَمَلِ الْأَجِيْرِ فَلَوِ اسْتَأْجَرَ السَّلاَّخَ لِيُسْلِمَ الشَّاةَ بِجِلْدِهَا أَوِ الطَّحَّانَ لِيُطْحِنَ الْحِنْطَةَ بِثُلُثِ دَقِيْقِهَا أَوْ بِصَاعٍ مِنْهُ أَوْ بِالنَّخَالَةِ أَوِ الْمُرْضِعَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الرَّقِيْقِ الْمُرْتَضِعِ بِعَدَمِ الْحِطَامِ أَوْ قَاطَفَ الثِّمَارَ بِجُزْءٍ مِنْهَا بَعْدَ الْقِطَافِ أَوْ لِيَنْسُجَ الثَّوْبَ بِنِصْفِهِ فَكُلُّ هَذَا فَاسِدٌ وَلِلأَجِيْرِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ

Disyaratkan bagi upah itu bukan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pekerjaan yang dilakukan buruh. Jika seandainya menyewa tukang jagal untuk menguliti kambing dengan upah kulitnya, atau tukang giling roti untuk menggiling gandum dengan upah sepertiga atau satu *sha'* (2,751 kg) tepung yang digilingnya, atau wanita tukang menyusui dengan upah sebagian dari budak yang menyusui padanya setelah masa sapih, atau pemetik buah-buahan dengan upah sebagian dari buah yang dipetiknya, atau untuk menenun pakaian dengan upah separuh dari pakaian tersebut, maka semua persewaan itu *fasid* dan buruh berhak

---

[34] Yusuf al-Ardabili, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Jilid I, h. 590.

mendapatkan upah standar.

2. *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*[35]

أَنَّ الْإِجَارَةَ تَفْسُدُ إِذَا جَعَلَ أُجْرَةَ النُّسَّاجِ جُزْءَ الثَّوْبِ الَّذِيْ يُنْسِجُهُ لِلْجَهْلِ وَكَذَلِكَ جُزْءُ جِلْدٍ أَوْ جُلُوْدٍ لِدَبَّاغٍ، قَالَ فِيْ كِتَابِ الْجُعْلِ وَالْإِجَارَةُ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ وَلاَ يَجُوْزُ أَنْ تُؤَاجِرَهُ عَلَى دَبْغِ جُلُوْدٍ أَوْ عَمَلِهَا أَوْ يُنْسِجُ ثَوْبًا عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا فَرَغَ لاَ يَدْرِيْ كَيْفَ يَخْرُجُ ذَلِكَ وَلِأَنَّ مَا لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُؤَاجِرَ بِهِ اِنْتَهَى. فَهَذَا مَجْهُوْلٌ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعَلِّمْهُ بِأَجْرِهِ

Sesungguhnya *ijarah* itu rusak jika penyuruh menjadikan bagian baju yang ditenunnya itu sebagai upah menenun, karena tidak diketahui (ukurannya). Begitu pula tidak boleh mengupah dengan sebagian kulit dari binatang yang dikulitinya. Pada kitab *al-Ju'l wa al-Ijarah* dalam kitab *al-Mudawnah* Imam Malik berkata: "Dan kamu tidak boleh menyewa seseorang untuk menyamak kulit hewan, pekerjaannya, atau menenun pakaian dengan upah separuhnya jika sudah selesai, karena ia tidak mengetahui bagaimana (berapa) hasilnya. Karena yang tidak diperbolehkan adalah menyewanya dengan upah tersebut. Sampai di sini perkataan beliau. Maka ini adalah upah yang tidak diketahui. Nabi Saw. bersabda: *"Barangsiapa yang menyewa buruh, maka ia beritahukanlah dia upahnya."*

3. *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*[36]

إِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُطْحِنَ لَهُ قَفِيْزًا مِنْ حِنْطَةٍ بِرُبُعٍ مِنْ دَقِيْقِهَا أَوْ لِيُعْصِرَ لَهُ قَفِيْزًا مِنْ سِمْسِمٍ بِجُزْءٍ مَعْلُوْمٍ مِنْ دُهْنِهِ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ لِأَنَّ الْأَجِيْرَ يَنْتَفِعُ بِعَمَلِهِ مِنَ الطَّحْنِ وَالْعَصْرِ فَيَكُوْنُ عَامِلاً لِنَفْسِهِ ... وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا بِبَلْخٍ جَوَّزَ هَذِهِ الْإِجَارَةَ وَهُوَ مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَمَةَ وَنَصْرٌ بْنُ يَحْيَ

Jika seseorang menyewa orang lain untuk menggiling satu *qafiz* (±27,817 kg) gandum untuk dijadikan roti dengan upah seperempat dari tepungnya, atau untuk memeras satu *qafiz simsim* dengan upah sebagian dari minyaknya, maka hal ini tidak boleh. Karena si buruh mendapat untung dengan pekerjaannya berupa penggilingan dan pemerasan itu. Berarti ia bekerja untuk dirinya sendiri ... sebagian ulama kita (madzhab Hanafiyah) di kota Balkha, yaitu Muhammad bin Salamah dan Nashr bin Yahya memperbolehkan *ijarah* semacam ini.

---

[35] Ibn Abdurrahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dar al-Nasyr, 1398 H), Jilid V, h. 390-399.

[36] Mahmud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 192.

4. *Al-Mughni*[37]

الْقِسْمُ الثَّالِثُ إِجَارَتُهَا بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ فَالْمَنْصُوْصُ عَنْ أَحْمَدَ جَوَازُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَ أَبُوْ الْخَطَّابِ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَهُوَ الصَّحِيْحُ إِنْ شَاءَ اللهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ فِيْ النَّهْيِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهَا لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ بِعِوَضٍ مَجْهُوْلٍ فَلَمْ تَصِحَّ كَإِجَارَتِهَا بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى، فَأَمَّا نَصُّ أَحْمَدَ فِيْ الْجَوَازِ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَيَكُوْنُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ

Bagian ketiga adalah menyewakan lahan tanah dengan sebagian hasilnya secara menyeluruh yang belum ditentukan, seperti setengah dan sepertiga, maka menurut pendapat *al-manshush* (yang dijelaskan) dari Imam Ahmad hal ini boleh. Pendapat itu adalah pendapat mayoritas *Ashhab* Hanabilah. Sementara Abu al-Khaththab memilih bahwa *ijarah* itu tidak sah. Pendapat itu juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Pendapat ini merupakan yang *shahih insyaallah* seperti hadits-hadits tadi yang melarang tanpa ada penentangnya. Sebab, *ijarah* tersebut adalah *ijarah* dengan upah yang tidak jelas, maka tidak sah. Seperti menyewakannya dengan upah sepertiga dari hasil tanah yang lain.

Adapun pendapat Imam Ahmad yang memperbolehkannya itu, maka harus dipahami untuk kasus *muzara'ah* (menyerahkan lahan kepada orang yang menanaminya dengan hasil dibagi kedua pihak) dengan lafal *ijarah*. Karenanya, maka hukumnya adalah hukum *muzara'ah*.

5. *Referensi Lain*

a. *Kasyf al-Qina'*, Juz III, h. 525.
b. *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz III, h. 390.
c. *Jawahir al-Iklil*, Juz II, h. 185.
d. *Al-Hidayah*, Juz III, h. 271.
e. *Raudlah al-Thalibin*, Juz IV, 251.
f. *Nihayah al-Muhtaj*, Juz V, h. 268.

405. Menggusur Tanah Rakyat untuk Kepentingan Umum

S. Pembangunan ternyata banyak menimbulkan ekses. Di antaranya yang cukup serius dan merugikan kepentingan rakyat, adalah penggusuran tanah

---

37 Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz V, h. 249.

untuk kepentingan pembangunan. Dalih penggusuran tersebut biasanya untuk kepentingan umum. Tetapi, tak jarang diktum kepentingan umum itu adalah selubung saja untuk menutupi kepentingan beberapa oknum tertentu. Hal ini diperparah lagi oleh kenyataan bahwa ganti rugi penggusuran biasanya tidak sesuai dengan yang dikehendaki rakyat.

a. Bagaimana hukum menggusur tanah rakyat untuk kepentingan umum?
b. Bagaimana cara terbaik untuk menentukan ganti rugi penggusuran menurut fiqh?

J. a. Hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syara' dan dengan ganti rugi yang memadai.

b. Cara yang terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah menurut fiqh ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Keterangan, dari kitab:

1. *Ahkam al-Sulthaniyah*[38]

فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ﷺ وَكَثُرَ النَّاسُ وَسَّعَ الْمَسْجِدَ وَاشْتَرَى دَوْرًا هَدَمَهَا وَزَادَهَا فِيْهِ وَهَدَمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ جِيْرَانِ الْمَسْجِدِ أَبَوْا أَنْ يَبِيْعُوْا وَوَضَعَ لَهُمْ الْأَثْمَانَ حَتَّى أَخَذُوْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا قَصِيْرًا دُوْنَ الْقَامَةِ وَكَانَتْ الْمَصَابِيْحُ تُوْضَعُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ ﷺ أَوَّلَ مَنْ يَتَّخِذُ جِدَارًا لِلْمَسْجِدِ. فَلَمَّا أُسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ ﷺ اِبْتَاعَ مَنَازِلَ فَوَسَّعَ بِهَا الْمَسْجِدَ وَأَخَذَ مَنَازِلَ أَقْوَامٍ وَوَضَعَ لَهُمْ أَثْمَانَهَا فَضَجُّوْا مِنْهُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَالَ: إِنَّمَا جَرَأَكُمْ عَلَيَّ حِلْمِيْ عَنْكُمْ فَقَدْ فَعَلَ بِكُمْ عُمَرُ ﷺ هَذَا فَأَقْرَرْتُمْ وَرَضِيْتُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ إِلَى الْحَبْسِ حَتَّى كَلَّمَهُ فِيْهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسَدٍ فَخَلَّى سَبِيْلَهُمْ

Ketika Umar r.a diangkat sebagai Khalifah dan jumlah penduduk semakin banyak, ia perluas mesjid Nabawi dengan membeli rumah dan dirobohkannya. Lalu ia menambah perluasannya dengan merobohkan (bangunan) penduduk sekitar mesjid yang enggan menjualnya. Beliau lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Beliau membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia, dan memasang lampu-lampu di atasnya. Beliau adalah orang yang pertama kali membuat dinding untuk mesjid.

---

[38] Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa al-halabi, 1966), Cet. 2, h. 162.

Ketika Utsman r.a. diangkat sebagai khalifah, ia lalu membeli rumah-rumah (untuk perluasan mesjid Nabawi). Beliau mengambil rumah-rumah penduduk dan menetapkan harganya. Mereka lalu berdemo di kediamannya. Beliau lalu berkata: *"Sungguh kesabarankulah yang membuat kalian berani terhadapku, sungguh hal ini pernah dilakukan Umar terhadap kalian, dan kalian menyetujuinya"*. Lalu beliau memerintah memenjarakan mereka, sampai Abdullah bin Khalid bin Asad berbicara kepadanya, dan ia melepas mereka kembali.

2. *Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain*[39]

إِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَاحْتَاجَ إِلَى تَوْسِعَتِهِ وَبِجَانِبِهِ عِقَارٌ وُقِفَ أَوْ مُلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ بَيْعُ الْحَبْسِ لِتَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الْحَبْسِ أَوِ الْمِلْكِ مِنْ بَيْعِ ذَلِكَ فَالْمَشْهُوْرُ الْجَبْرُ عَلَى الْبَيْعِ وَيَشْتَرِيْ بِثَمَنِ الْحَبْسِ حَبْسًا كَالْأَوَّلِ وَمِثْلُ تَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ تَوْسِعَةُ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَقْبَرَتِهِمْ. وَأَمَّا تَوْسِعَةُ بَعْضِ الثَّلاَثَةِ مِنْ بَعْضٍ فَفِيْ "ح ج" أَنَّهُ يُؤْخَذُ الْجَوَازُ مِنَ الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ أَنَّ مَا كَانَ لِلّٰهِ فَلاَ بَأْسَ فِيْهِ أَنْ يُسْتَعَانَ بِبَعْضِهِ فِيْ بَعْضٍ إِلاَّ أَنَّ فِيْ بَعْضِ الشُّرَّاحِ التَّنْصِيْصَ بِأَنَّهُ لاَ يُهْدَمُ الْمَسْجِدُ لِتَوْسِعَةِ الطَّرِيْقِ بِخِلاَفِ الدَّفْنِ فِيْهِ لِضَيْقِ الْمَقْبَرَةِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ بَاقٍ بِحَالِهِ

Bila mesjid sudah sempit tidak muat lagi dan membutuhkan perluasan, sedangkan di sampingnya terdapat tanah wakaf atau milik seseorang, maka boleh menjual tanah wakaf itu untuk perluasan mesjid tersebut walaupun pemilik wakaf atau tanah tersebut menentangnya. Menurut pendapat masyhur, boleh memaksa penjualan dan kemudian membeli tanah lain dengan hasil penjualan tanah wakaf itu. Sama dengan perluasan mesjid adalah perluasan jalan dan kuburan bagi umat Islam.

Adapun memperluas sebagian dari ketiganya (mesjid, jalan dan kuburan umum) dengan sebagian lainnya, maka dalam kitab ح ج, sungguh diambil kesimpulan hukum boleh dari ungkapan *al-Syarih* pada ungkapan *al-mushannif*: "Dan syarat pihak yang mewakafkan itu harus diikuti, bila syarat tersebut boleh.", yaitu ucapan beliau: "Sungguh wakaf yang menjadi hak milik Allah, maka sebagiannya boleh digunakan untuk menolong sebagian yang lain." Hanya saja di sebagian *Syarh* terdapat kejelasan, bahwa mesjid tidak boleh dirobohkan untuk perluasan jalan. Berbeda mengubur jenazah di mesjid karena sempitnya kuburan. Sebab

---

39 Muhammad Ali al-Maliki, *Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1937), h. 259.

mesjid tetap eksis pada kondisinya.

3. *Hasyiyah 'Ali Syibramallisi 'ala Nihayah al-Muhtaj*[40]

وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا يَقَعُ بِمِصْرِنَا كَثِيْرًا مِنَ الْمُنَادَاةِ مِنْ جَانِبِ السُّلْطَانِ بِقَطْعِ الطُّرُقَاتِ الْقَدْرَ الْفُلاَنِيَّ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهَلْ هُوَ مِنَ الْأُمُوْرِ الَّتِيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَصْلَحَةٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَتَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ مَيَاسِرِ الْمُسْلِمِيْنَ أَمْ لاَ؟ وَالْجَوَابُ، الظَّاهِرُ الْجَوَازُ بَلِ الْوُجُوْبُ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ. وَالظَّاهِرُ الْوُجُوْبُ عَلَى الْإِمَامِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ صَرْفُ أُجْرَةِ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ لِظُلْمِ مُتَوَلِّيْهِ فَعَلَى مَيَاسِرِ الْمُسْلِمِيْنَ

Ada pertanyaan tentang kasus yang sering terjadi di kota kami, tentang orang-orang pemerintahan yang menyerukan pemotongan beberapa ruas jalan dengan ukuran tertentu: "Apakah hal itu boleh? Apakah termasuk perkara yang menghasilkan kemaslahatan umum umat Islam, maka wajib bagi penguasa, lalu orang-orang kaya muslim atau tidak?"

Jawabannya adalah: "Yang jelas hal itu boleh, bahkan wajib bagi penguasa sekira menghasilkan kemaslahatan. Yang jelas kewajiban itu dibebankan bagi penguasa, dan ia wajib membayar biayanya dari *bait al-mal*. Bila hal itu tidak mudah dilakukan karena kezaliman pegawainya, maka biaya itu dibebankan pada orang-orang kaya muslim.

4. *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*[41]

أَنَّ مِنَ الْجَبْرِ الشَّرْعِيِّ جَبْرُ مَنْ لَهُ رَبْعٌ يُلاَصِقُ الْمَسْجِدَ وَافْتُقِرَ لِتَوْسِيعِ الْمَسْجِدِ بِهِ عَلَى بَيْعِهِ لِتَوْسِيعِ الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ أَرْضٌ تُلاَصِقُ الطَّرِيْقَ بِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الرُّشْدِ وَاحْتَجَّ عَلَى فُتْيَاهُ بِقَوْلِ سَحْنُونٍ يُجْبَرُ ذُو أَرْضٍ تُلاَصِقُ طَرِيْقًا هَدَمَهَا نَهْرٌ لاَ مَمَرَّ لِلنَّاسِ إِلاَّ فِيْهَا عَلَى بَيْعِ طَرِيْقٍ فِيْهَا لَهُمْ بِثَمَنٍ يَدْفَعُهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَبِفِعْلِ عُثْمَانَ ﷺ فِيْ تَوْسِعَةِ مَسْجِدِهِ ﷺ وَبِقَوْلِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ إِذَا غَلاَ الطَّعَامُ وَاحْتِيْجَ إِلَيْهِ أَمَرَ الْإِمَامُ أَهْلَهُ بِإِخْرَاجِهِ إِلَى السُّوْقِ

Sungguh yang termasuk pemaksaan *syar'i* adalah pemaksaan pada seseorang yang punya rumah bergandengan dengan mesjid dan dibutuhkan untuk perluasannya, agar menjual rumahnya untuk keperluan perluasan mesjid. Begitu pula orang yang memiliki tanah bergandengan dengan jalan umum. Ibn Rusyd berfatwa dengan hukum itu, dan ber*hujjah*

---

[40] Ahmad bin Qasim al-'Abbadi, *Hawasyi Ibn Qasim al-'Abbadi* pada *Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi*, (Beirut: dar Ihya a-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz VI, h. 216.

[41] Ibn Abdurrahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dar al-Nasyr, 1398 H), Jilid V, h. 390-399.

atas fatwanya dengan (i) pendapat Sahnun: "Orang yang memiliki tanah bergandengan dengan jalan yang dihantam sungai dan masyarakat tidak mempunyai jalan selain tanah itu, maka si pemiliknya dipaksa untuk menjual jalan yang berada ditanahnya itu demi kepentingan masyarakat, dengan harga yang dibayarkan penguasa dari *bait al-mal*, (ii) dengan tindakan Utsman Ra. Yang memperluas Masjid Nabawi, dan (iii) dengan pendapat Imam malik dan selainnya, yaitu ketika harga makanan mahal, dan sangat dibutuhkan, maka penguasa harus memerintahkan pemiliknya untuk menjualnya ke pasar.

5. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*[42]

...لأَنَّ الْمَصَالِحَ الْعَامَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ بِدَلِيْلِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّى السِّلَعِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيِّ وَاتِّفَاقِ السَّلَفِ عَلَى تَضْمِيْنِ الصُّنَّاعِ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ فِيْهِمْ الأَمَانَةُ ... لَكِنْ بِحَيْثُ لاَ يَلْحَقُ الْخُصُوْصَ مَضَرَّةٌ

... sesungguhnya kepentingan umum itu didahulukan di atas kepentingan khusus, berdasarkan dalil pelarangan pembelian barang sebelum sampai pasar, penjualan barang orang kota ke orang pedalaman (yang buta harga) dan kesepakatan ulama salaf terhadap jaminan yang harus ditanggung oleh tukang (jika terjadi kerusakan) besertaan hukum dasar bagi mereka adalah amanah. ... sekiranya yang khusus itu tidak mengalami bahaya.

6. *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*[43]

وَأَمَّا لَوْ أُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ جَبْرًا حَلاَلاً كَانَ الْبَيْعُ لاَزِمًا كَجَبْرِهِ عَلَى بَيْعِ الدَّارِ لِتَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ أَوِ الطَّرِيْقِ أَوِ الْمَقْبَرَةِ

Adapun jika dipaksa untuk menjual dengan pemaksaan yang halal, maka penjualannya sah sebagaimana pemaksaan menjual tanah untuk perluasan mesjid, jalan umum atau kuburan.

7. *Al-Dur al-Mukhtar*[44]

(تُؤْخَذُ أَرْضٌ) وَدَارٌ وَحَانُوتٌ (بِجَنْبِ مَسْجِدٍ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ بِالْقِيمَةِ كُرْهًا)

Boleh mengambil tanah, rumah atau toko yang berada di samping mesjid yang sempit bagi jamaah dengan ganti rugi harga secara paksa.

---

[42] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: al-Madani, 1969), Juz II, h. 257.

[43] Ibn 'Irfah al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), Jilid III, h. 6.

[44] Muhammad bin Ali al-Hashkafi, *al-Dur al-Mukhtar* pada *Rad al-Muhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Jilid IV, h. 379.

7. Madkhal al-Fiqh al-'Amm[45]

وَالصُّوْرَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ الاسْتِمْلاَكُ لِأَجْلِ مَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَقَدْ أَجَازَ الشَّرْعُ الْإِسْلاَمِيُّ اسْتِمْلاَكَ الْأَرْضِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَسْجِدِ جَبْرًا عَلَى أَصْحَابِهَا إِذَا امْتَنَعُوْا عَنْ بَيْعِهَا وَضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَاحْتَاجَ إِلَيْهَا كَمَا أَجَازُوْا مِثْلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ تَوْسِيْعِ الطَّرِيْقِ إِذَا دَعَتْ حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى تَوْسِيْعِهِ وَذَلِكَ بِالْقِيْمَةِ الَّتِيْ يُسَاوِيْهَا الْعِقَارُ الْمُسْتَمْلَكُ حَتَّى لَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يُؤْخَذَ لِتَوْسِيْعِ الطَّرِيْقِ جَانِبٌ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

Contoh kedua adalah pengambilan hak milik demi kepentingan umum. Agama Islam memperbolehkan pengambilan hak milik tanah yang berdampingan dengan mesjid secara paksa jika si pemilik enggan menjualnya. Sementara mesjid sudah sempit bagi para jamaahnya dan mereka membutuhkannya. Seperti halnya para ulama memperbolehkan kasus semacam itu untuk perluasan jalan umum ketika masyarakat sangat membutuhkannya, dengan memberikan (ganti rugi) harga yang sepadan dengan harga tanah yang diambil hak miliknya. Bahkan para fuqaha juga telah menjelaskan, bahwa boleh mengambil satu sisi dari mesjid untuk keperluan perluasan jalan umum ketika dibutuhkan.

406. Mencemarkan Lingkungan

S. Industrialisasi yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, ternyata membawa ekses yang cukup serius, dan dampaknya juga merugikan kepentingan rakyat banyak, yakni biasanya hanya mengejar keuntungan sendiri, serta melupakan kewajiban untuk menangani dampak limbah yang ditimbulkan oleh pabrik.

a. Bagaimana hukum mencemarkan lingkungan?

b. Bagaimana konsep Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan?

J. a. Hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dharar*, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*).

b. Konsepsi Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan adalah:

1. Apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar.
2. Memberikan hukuman yang menjerakan (terhadap pencemar)

---

[45] Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, (Damaskus: Alif Ba al-Adib, 1968H), Jilid I, h. 248.

yang pelaksanaannya dengan *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan tingkatannya.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghaib*[46]

قَالَ اللهُ تَعَالَى "وَلاَ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا" (الأعراف: ٥٦) فَقَوْلُهُ "وَلاَ تُفْسِدُوْا" مَنْعٌ عَنْ إِدْخَالِ مَاهِيَةِ الإِفْسَادِ فِي الْوُجُوْدِ وَالْمَنْعُ مِنْ إِدْخَالِ الْمَاهِيَةِ فِي الْوُجُوْدِ يَقْتَضِيْ الْمَنْعَ مِنْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِهِ وَأَصْنَافِهِ فَيَتَنَاوَلُ الْمَنْعَ مِنَ الإِفْسَادِ فِيْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ "بَعْدَ إِصْلاَحِهَا" فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ بَعْدَ أَنْ أَصْلَحَ خِلْقَتَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُطَابِقِ لِمَنَافِعِ الْخَلْقِ وَالْمُوَافِقِ لِمَصَالِحِ الْمُكَلَّفِيْنَ

Allah Swt. berfirman: *"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya ..."* (QS. Al-A'raf: 56). Firman Allah Swt. *"Dan janganlah kalian membuat kerusakan."* adalah larangan membuat kerusakan apapun dalam barang yang wujud, dan larangan dalam barang yang wujud berarti larangan pula dalam segala macam dan jenisnya. Sehingga larangan tersebut mencakup larangan membuat kerusakan pada lima perkara ini (jiwa, harta, nasab, agama dan akal). Sedangkan firman Allah Swt.: *"(Sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya."* bisa berarti yang dimaksud adalah setelah Allah Swt. membuat baik bentuk semulanya pada bentuk yang cocok bagi kepentingan makhluk dan sesuai dengan kemaslahatan para *mukallaf*.

2. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*[47]

قَالَ اللهُ تَعَالَى "وَلاَ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا" فِيْهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَهَى عَنْ كُلِّ فَسَادٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بَعْدَ صَلاَحٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَهُوَ عَلَى الْعُمُوْمِ عَلَى الصَّحِيْحِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَقَالَ الضَّحَّاكُ مَعْنَاهُ لاَ تَعَوَّرُوْا الْمَاءَ الْمُعَيَّنَ وَلاَ تَقْطَعُوْا الشَّجَرَ الْمُثْمِرَ

Dalam firman Allah Swt.: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya ..."* (QS. Al-A'raf: 56) di dalamnya terdapat satu permasalahan, yaitu bahwa Allah Swt. telah melarang semua tindakan pengrusakan, sedikit ataupun banyak setelah perbaikan, sedikit atau banyak. Menurut pendapat yang sahih, larangan

---

[46] Muhammad al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir/ Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz XIV, h. 139.

[47] Muhammad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1967), Jilid VII, h. 226.

itu berlaku secara umum. Sementara menurut al-Dhahhak artinya yaitu: *"Janganlah kalian mencemari air tertentu, dan janganlah memotong pohon yang berbuah."*

3. *Al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah*[48]

عِبَارَةُ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ وَالْمَعْنَى لاَ جُنَاحَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى إِنْسَانٍ فِيْمَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ غَالِبًا وَلاَ يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَضُرَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

Ungkapan *la dharara wala dhirara,* maksudnya adalah secara umum tidak berdosa melakukan tinadkan yang merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim.

4. *Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*[49]

وَلَوْ أَرَادَ بِنَاءَ تَنُوْرٍ فِيْ دَارِهِ لِلْخُبْزِ الدَّائِمِ كَمَا يَكُوْنُ فِيْ الدَّكَاكِيْنِ أَوْ رَحًا لِلطَّحْنِ أَوْ مِدَقَّاتٍ لِلْقَصَّارِيْنَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالْجِيْرَانِ ضَرَراً ظَاهِرًا لاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَجُوْزَ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيْ مِلْكِهِ وَتُرِكَ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ

Dan bila seseorang ingin membangun dapur api di rumahnya untuk selalu membuat roti seperti yang ada di toko-toko, atau penggilingan untuk menggiling tepung, atau penumbuk untuk tukang setrika, maka hal itu tidak boleh karena mengganggu para tetangga dengan gangguan jelas yang tidak dapat dihindari. Sedangkan menurut *qiyas,* hal tersebut semestinya boleh, sebab merupakan pemberdayaan pada harta miliknya sendiri. Namun hal tersebut harus ditinggalkan berdasar pada *istihsan* demi kepentingan (umum).

5. *Al-Kharraj*[50]

وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ أَرْضًا لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِذَلِكَ لِيُغْرِقَ حَرْثَهُ فِيْهَا يُرِيْدُ بِذَلِكَ الْإِضْرَارَ بِهِ فَقَدْ نَهَى الرَّسُوْلُ ﷺ عَنِ الضِّرَارِ وَقَدْ قَالَ مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ غَيْرَهُ.

Tidak halal bagi orang muslim sengaja (memasuki tanah) milik orang muslim lainnya ataupun milik kafir *dzimmi* dengan maksud ingin menenggelamkan sawahnya dan dengan tujuan untuk menimbulkan

---

[48] Abdullah bin Sulaiman, *al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah* pada *al-Asybah wa al-Nadzair,* (Indonesia: dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 114.

[49] Utsman bin Ali al-Zaila'i, *Tabyin Haqaiq Syarh Kanz al-Daqa'iq,* (Pakistan: Maktabah Imdadiyah, t. th.), Jilid III, h. 196.

[50] Abu Yusuf, *al-Kharraj,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), h. 99.

kerusakan padanya. Sungguh Rasul Saw. telah melarang tindakan yang merugikan orang lain. Sungguh beliau bersabda: *"Terlaknat orang yang membahayakan seorang muslim ataupun selainnya."*

6. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*[51]

لَوْ نَصَبَ فِيْ دَارِهِ رَحًى أَوْ وَضَعَ فِيْهَا حَدَّادِيْنَ وَقَصَّارِيْنَ لَمْ يُمْنَعْ

Apa bila seseorang membangun penggilingan atau mempekerjakan tukang pandai besi dan tukang setrika di rumahnya (sehingga mengganggu tetangga), maka hal itu tidak dilarang.

7. *Majma' al-Dhamanat*[52]

رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُحْرِقَ حَصَائِدَ أَرْضِهِ فَأَوْقَدَ النَّارَ فِيْ حَصَائِدِهِ فَذَهَبَتْ النَّارُ إِلَى أَرْضِ جَارِهِ فَأَحْرَقَ زَرْعَهُ لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَقَ حَصَائِدَهُ تَتَعَدَّى النَّارُ إِلَى زَرْعِ جَارِهِ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ كَانَ قَاصِدًا إِحْرَاقَ زَرْعِ الْغَيْرِ ... وَكَذَلِكَ رَجُلٌ لَهُ قَطْنٌ فِيْ أَرْضِهِ وَأَرْضُ جَارِهِ لاَصِقَةٌ بِأَرْضِهِ فَأَوْقَدَ النَّارَ مِنْ طَرْفِ أَرْضِهِ إِلَى جَانِبِ الْقُطْنِ كَانَ ضَمَانُ الْقُطْنِ عَلَى الَّذِيْ أَوْقَدَ النَّارَ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ نَارَهُ تَتَعَدَّى إِلَى الْقُطْنِ كَانَ قَاصِدًا إِحْرَاقَ الْقُطْنِ

Jika seseorang ingin membakar panenan (jerami) di tanahnya, lalu ia menyalakan api dan kemudian menjalar ke tanah tetangganya sehingga membakar tanamannya, maka ia tidak harus bertanggungjawab. Kecuali ia mengetahui, bila ia membakar sawahnya maka api akan menjalar ke tanaman tetangganya. Sebab, jika ia sudah mengetahui maka berarti ia sengaja membakar tanaman orang lain. ... Begitu pula seseorang yang memiliki tanaman kapas di tanahnya dan tanah orang lain bergandengan dengannya. Lalu orang lain itu menyalakan api dari sisi tanahnya sendiri dan menjalar ke bagian kapas, maka ganti rugi kapas adalah kewajiban bagi orang yang menyalakan api. Sebab ketika ia sudah mengetahui bahwa apinya akan menjalar ke kapas itu, berarti ia sengaja membakarnya.

8. *Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq*[53]

وَمِنْ مَعَاصِيْ الْبَدَنِ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَإِيْذَاءِ الْجَارِ وَلَوْ كَافِرًا لَهُ أَمَانٌ كَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُعَاهَدِ أَذًى ظَاهِرًا لِقَوْلِهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

---

51 Abu Ya'la al-Farra', *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Surabaya: Ahmad Nabhan, 1974), h. 301-302.

52 Ghanim bin Muhammad al-Baghawi, *Majma' al-Dhamanat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), h. 390.

53 Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq*, (Indonesia: CV. Karya Insan, t. th.), h. 79.

فَلاَ يُؤْذِيْ جَارَهُ ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ

Dan di antara maksiat badan adalah durhaka terhadap orang tua, melarikan diri dari medan pertempuran, memutus tali persaudaraan, dan mengganggu tetangga dengan gangguan yang nyata walaupun orang non muslim yang berhak memperoleh keamanan, seperti non muslim *musata'man* dan *mu'ahad,* berdasarkan sabda Nabi Saw.: *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya."* Begitu penuturan al-Ramli.

9. *Ihya' 'Ulum al-Din*[54]

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ فَفِيْ الْآيَةِ بَيَانُ الْإِيْجَابِ ... وَفِيْهَا بَيَانٌ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لاَ فَرْضُ عَيْنٍ وَأَنَّهُ إِذَا قَامَ بِهِ أُمَّةٌ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنِ الْآخَرِيْنَ إِذْ لَمْ يَقُلْ كُوْنُوْا كُلُّكُمْ آمِرِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104). Dalam ayat ini terdapat perintah wajib. ... Dalam ayat itu terdapat penjelasan pula bahwa *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan *fardhu kifayah* bukan *fardhu 'ain,* dan ketika ada sekelompok umat yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Sebab Allah Swt. tidak berfirman: *"Dan jadilah kalian semua sebagai orang yang menyuruh perkara baik."*

10. *Referensi Lain*

   a. *Hasyiyah al-Jamal,* Juz V, h. 196.
   b. *Tafsir Ibn Katsir,* Juz II, 222. []

---

[54] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid III, h. 131-132.